

KORELASI KEBIJAKAN HARGA BERAS DENGAN KESEJAHTERAAN PETANI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Erra Septy Vibriane¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Zainuddin Saenong²⁾ dan Ernawati²⁾

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo

Abstract

The objectives of this research are: (1) to know the relationship between Government Purchase Price (HPP) policy with the Rice Price at farmer level in Sulawesi Tenggara Province and (2) to know the correlation between Government Purchase Price (HPP) policy with farmers welfare in Sulawesi Tenggara Province. This research use monthly data in the form of data of HPP of Rice, Grain Price, and Farmer's Term of Trade of Food Crops Sub-sector (NTP-TP). The Correlation between HPP of Rice and Grain Price and also HPP of Rice and NTP-TP done separately by using Pearson Correlation Analysis.

Results of this study showed that there is a direct and significant correlation between rice price policy and price of grain but this price policy even decreased the welfare of foodcrop farmers in Sulawesi Tenggara Province. This is because the price policy is only able to stimulate agricultural production but not followed by neither the control of the rate of increase in household consumption nor production cost.

Keywords: *Price Policy, Rice Policy, Farmers Welfare*

1. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia masih bergantung konsumsi utama pangannya pada beras. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada September 2015, rata-rata konsumsi dan pengeluaran perkapita masyarakat Indonesia terhadap beras adalah sebesar 1,631 kg per minggu atau sekitar 86,59 persen dari konsumsi jenis padi-padian dan umbi-umbian. Data ini menunjukkan tingginya konsumsi penduduk Indonesia terhadap beras. Hal ini menyebabkan komoditi ini tidak hanya memiliki nilai strategis secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan politik.

Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara, meskipun bukan sebagai provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia, namun produksi padi di Sulawesi Tenggara memberikan kontribusi dalam pasar domestik dan selalu mengalami kenaikan produksi pada kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2015, produksi padi di Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 660.720 ton Gabah Kering Giling atau meningkat sebesar 0,74 persen dari produksi pada tahun 2014 (BPS, 2016). Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian, penyerapan tenaga kerja terbesar oleh sektor pertanian, dan peningkatan produksi tanaman padi menunjukkan bahwa bahwa sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara

masih menjadi lapangan usaha utama bagi penduduknya dan menjadikannya sebagai sektor unggulan (Darman, 2016).

Dasar penentuan sektor unggulan suatu daerah adalah berdasarkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 2011 sampai 2014, meskipun bukan sektor yang mengalami laju pertumbuhan yang paling tinggi, namun menunjukkan bahwa sektor ekonomi selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Tercatat laju pertumbuhan di lapangan usaha pertanian tahun 2013 adalah sebesar 6,09 persen dan meningkat menjadi 9,11 persen pada tahun 2014.

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri, banyak permasalahan yang kerap dihadapi petani, salah satunya adalah anjloknya harga jual gabah/beras pada saat panen raya, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak petani. Dari sisi konsumen, harus ada perlindungan harga sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan beras dengan harga yang wajar mengingat beras adalah kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Kenaikan beras yang sedikit saja juga bisa menimbulkan gejolak sosial dan bisa memicu inflasi yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah membuat suatu kebijakan khusus mengenai perberasan yang disebut dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, BPS membuat laporan bulanan Nilai Tukar Petani (NTP), sebagai salah satu pendekatan pengukuran tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan salah satu pengukur kemampuan nilai tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan biaya yang dipergunakan untuk membeli sarana produksi pertanian. Indeks NTP hanya mengukur tingkat kesejahteraan dari waktu ke waktu, tapi tidak dapat dibandingkan antar provinsi atau daerah. Indeks NTP yang bernilai lebih dari 100 mengindikasikan secara relatif bahwa kemampuan daya beli petanitemungkinkan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar (BPS, 2016).

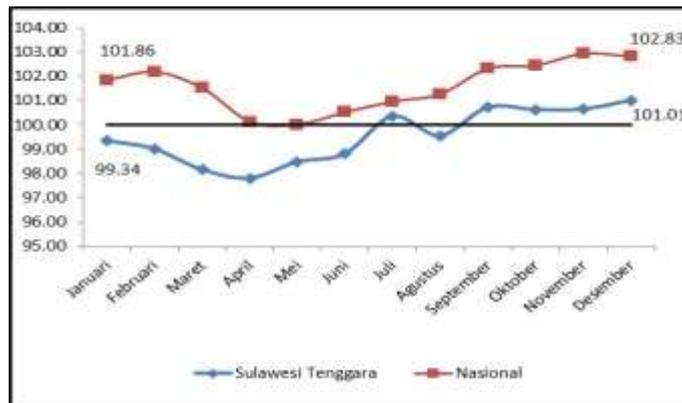
Tabel 1.1. Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah dan Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tenggara 2008 – 2015

Tahun	HPP Beras		NTP	
	Inpres	Rp/Kg	Nasional	Sulawesi Tenggara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008	No. 01/2008	4.300	100,14	103,52
2009	No. 08/2008	4.600	99,85	107,28
2010	No. 07/2009	5.060	101,77	108,64
2011	No. 07/2009	5.060	104,58	107,62
2012	No. 03/2012	6.600	105,24	106,45
2013	No. 03/2012	6.600	104,67	105,91
2014	No. 03/2012	6.600	102,03	101,32
2015	No. 05/2015	7.300	101,59	99,54

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Urusan Logistik (2016)

Sebagai sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara, sektor pertanian selayaknya mampu menyokong perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, dan hal itu tersampaikan dari gambaran umum tentang keadaan sektor pertanian serta Indeks Nilai Tukar Petani

di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki kecenderungan meningkat selama tahun 2015. Namun demikian, perlu diketahui lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani di Provinsi Sulawesi Tenggara. Apakah kebijakan harga memiliki hubungan terhadap kesejahteraan petani di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andrianto (2009) bahwa kebijakan harga berpengaruh nyata terhadap nilai tukar petani sebagai indikator kesejahteraan petani.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Gambar 1.1. NTP Nasional dan NTP Provinsi Sulawesi Tenggara 2015 (2012 = 100)

Diindikasikan salah satu yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani ini adalah harga dasar suatu komoditas yang bertujuan untuk melindungi produsen. Harga dasar ini dikenal sebagai harga pembelian pemerintah dimana pemerintah menetapkan harga minimum pada gabah dan beras sebagai bentuk perlindungan petani terhadap jatuhnya harga gabah terutama pada saat panen. Harga yang diterima petani inilah yang menjadi salah penentu dari kesejahteraan yang berarti terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga pertanian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kesejahteraan Petani

W.J.S Poerwadarminta mendefinisikan sejahtera sebagai terciptanya suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain, jika kebutuhan dan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka terciptalah kesejahteraan.

Mosher (1987), menyatakan bahwa hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Sehingga apabila ada peningkatan pendapatan, namun tidak diiringi dengan perubahan pola konsumsi, maka rumah tangga tersebut dikatakan sejahtera.

Kesejahteraan petani dapat didefinisikan sebagai pencapaian kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang didapatkan oleh rumah tangga yang berusaha dibidang pertanian.

Menurut Sadikin dan Subagyo (2008) bahwa indikator kesejahteraan petani bisa digambarkan melalui lima aspek, yaitu (1) Struktur pendapatan rumah tangga, (2) struktur pengeluaran rumah tangga, (3) keragaan tingkat ketahanan pangan rumah tangga, (4) keragaan daya beli rumah tangga petani dan (5) perkembangan Nilai Tukar Petani.

BPS menetapkan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai rasio yang diperoleh dari perbandingan Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b) yang dinyatakan dalam persentase. Indeks NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. Indeks NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang atau jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi Indeks NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Jika NTP bernilai lebih besar dari 100, menandakan bahwa petani berpeluang mengalami surplus. Harga hasil bertaniannya naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani bisa naik lebih besar dari pengeluarannya. Tingkat kesejahteraan petani memungkinkan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Jika NTP bernilai 100, menandakan bahwa petani mungkin hanya mengalami imbas/*break even*. Kenaikan/penurunan harga hasil bertaniannya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Dalam kondisi ini, tingkat kesejahteraan petani bisa jadi tidak mengalami perubahan dibandingkan kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Jika NTP bernilai kurang dari 100, menandakan kemungkinan petani mengalami defisit. Kenaikan harga hasil pertaniannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani bisa jadi lebih rendah dibandingkan tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Kebijakan Harga

Salah satu instrumen kebijakan harga yang dilakukan pemerintah adalah penetapan harga dasar (*floor price*) yang bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dan pendapatan petani melalui pemberian jaminan harga (*guaranteed price*) yang wajar. Harga Dasar adalah tingkat harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Penetapan harga dasar ini bertujuan untuk melindungi produsen dari penurunan harga barang yang tak terhitung.

Dampak yang terjadi dalam keseimbangan pasar akibat dari penetapan harga dasar tersebut adalah terjadi kelebihan penawaran (*excess supply*). Di sisi lain menimbulkan kekurangan permintaan (*shortage demand*). Dalam kata yang lain bahwa ketika terjadi penurunan harga barang yang tak terhitung, maka pada kondisi ini tingkat penawaran barang lebih tinggi dari permintaan sehingga terjadi kondisi surplus. Penawaran yang lebih tinggi akan mengurangi tingkat permintaan barang. Terus menurunnya jumlah permintaan mengakibatkan harga barang terus merosot sampai dibawah harga keseimbangan. Bila kemerosotan harga ini terus dibiarkan maka produsen akan merugi. Untuk itu pemerintah menetapkan harga dasar, untuk mencegah harga pasar terus merosot tajam.

Dengan adanya harga dasar, pedagang (produsen gabah) akan cenderung untuk lebih banyak menawarkan barangnya karena harganya diatas harga keseimbangan pasar, jadi dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sedang dari sisi permintaan yaitu konsumen (penggilingan) cenderung akan lebih sedikit melakukan permintaan karena harga yang ditawarkan lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar.

Di Indonesia, kebijakan harga dasar di bidang perberasan diwujudkan pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dituangkan dalam suatu ketetapan pada melalui instruksi presiden. Hal ini untuk memberikan jaminan pada para petani bahwa hasil produksinya akan dibeli pada harga yang ditetapkan pemerintah atau perusahaan yang telah ditunjuk. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi.

Kebijakan harga pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan harga hasil pertanian terutama pada tingkat produsen atau petani, meningkatkan petani melalui perbaikan nilai tukar petani (*term of trade*) dan memberikan arah atau petunjuk pada jumlah produksi beras (Mears, 1981 dalam Rahim, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif ini dapat diterapkan pada penelitian ini mengingat data yang tersedia yang berkaitan dengan penelitian ini sudah dikumpulkan terlebih dahulu menggunakan metode secara ilmiah.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan yang dimulai dari April sampai dengan Juni 2017. Provinsi Sulawesi Tenggara dipilih menjadi lokasi penelitian selain karena belum terdapatnya kajian tentang hubungan antara kebijakan harga beras terhadap kesejahteraan petanidi Provinsi Sulawesi Tenggara, sektor ekonomi pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara juga dianggap masih memiliki daya tarik bagi masyarakatnya dengan adanya ada kenaikan jumlah rumah tangga pertanian sesuai dengan hasil Sensus Pertanian 2013 sebanyak 0,72 persen dibandingkan angka nasional yang justru menurun jumlah rumah tangga pertaniannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik berupa data bulanan mulai dari tahun 2008 – 2016.

Pada penelitian ini, digunakan Analisis Korelasi atau sering juga disebut sebagai Korelasi Product Moment. Analisis ini dikembangkan oleh Karl Pearson dan bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi atau hubungan antar variabel yang digunakan. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi negatif).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Harga Gabah

Selama periode penelitian dari tahun 2008 sampai dengan 2016, harga penjualan gabah oleh petani cukup berfluktuatif antara Rp. 1.775,00 sampai dengan Rp. 4.293,00 dengan harga yang terus meningkat apabila dilakukan perbandingan harga rata-rata setiap tahunnya.

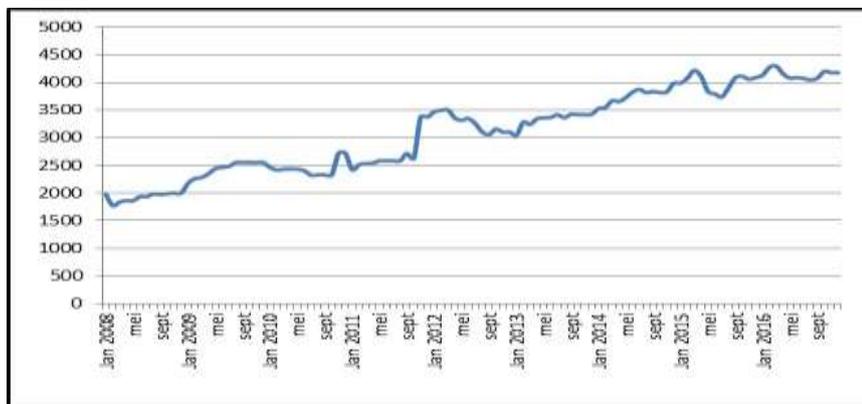
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PerubGABAH	108	39.32	-10.90	28.42	.8229	4.19404
GABAH	108	2518	1775	4293	3114.11	751.754
Valid N (listwise)	108					

Sumber : BPS (2017, diolah)

Gambar 4.1. Statistik Diskriptif Harga Gabah Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2016

Besar perubahan harga gabah setiap bulannya antara -10,90 persen sampai dengan 28,42 persen. Meskipun demikian secara rata-rata perubahan ini mengalami perubahan positif sebesar 0,82 persen dari bulan ke bulan.



Sumber : BPS, 2017 (diolah)

Gambar 4.2. Perkembangan Harga Gabah Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2016

Harga Pembelian Pemerintah

Harga Pembelian Pemerintah tidak ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. HPP ini memiliki kecenderungan naik setiap kali mengalami perubahan karena bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Instruksi presiden tentang perberasan yang terakhir dikeluarkan adalah No. 05 Tahun 2015.

Tabel 4.1. Besaran Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Gabah dan Beras Tahun 2008 – 2016

Tahun	Inpres	HPP Gabah (Rp/Kg)		HPP Beras (Rp/Kg)
		GKP	GKG	Medium
(1)	(2)	(4)	(5)	(3)
2008	No. 01/2008	2.200	2.800	4.300
2009	No. 08/2008	2.400	3.000	4.600
2010	No. 07/2009	2.640	3.300	5.060
2011	No. 07/2009	2.640	3.300	5.060
2012	No. 03/2012	3.300	4.150	6.600
2013	No. 03/2012	3.300	4.150	6.600
2014	No. 03/2012	3.300	4.150	6.600
2015	No. 05/2015	3.700	4.600	7.300
2016	No. 05/2015	3.700	4.600	7.300

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan petani subsektor tanaman pangan. Dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2016, keadaan NTP-TP Provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata bernilai kurang dari 100, yaitu rata-rata sebesar 89,95 dengan range indeks antara 81,56 persen yang terjadi pada Bulan Oktober dan November 2013, dan indeks tertinggi adalah sebesar 99,45 yaitu yang terjadi pada Januari 2008.

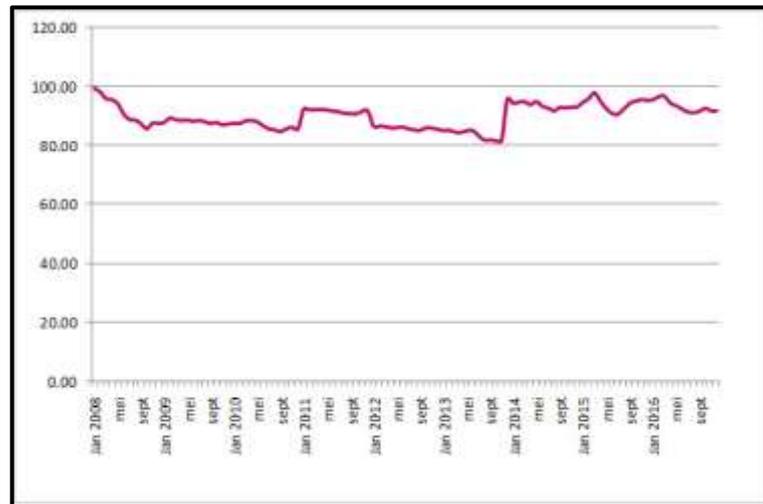
Tabel 4.2. Statistik Diskriptif NTP-TP Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2016

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PerubNTP	108	23.21	-5.71	17.50	-.0544	2.22596
NTPTP	108	17.89	81.56	99.45	89.9541	4.13869
Valid N (listwise)	108					

Sumber: BPS (2017, diolah)

Sedangkan jika dilihat dari persentase perubahan tiap bulannya, maka indeks NTP-TP ini cenderung mengalami penurunan sebesar 0,05 persen.



Sumber : BPS (2017, diolah)

Gambar 4.3. Perkembangan NTP-TP Sulawesi Tenggara Tahun 2008 – 2016

Korelasi Antara HPP Beras Dengan Harga Gabah

Hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi sebesar 0,941 antara variabel HPP beras dengan harga gabah. Hubungan ini signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen atau dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 0,01$). Koefisien korelasi sebesar 0,941 menegaskan bahwa hubungan antara kedua variabel ini menunjukkan keeratan hubungan yang kuat sekali.

Tabel 4.3. Korelasi Antara HPP Beras Dengan Harga Gabah

		Correlations	
		GABAH	HPPBERAS
GABAH	Pearson Correlation	1	.941**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	108	108
HPPBERAS	Pearson Correlation	.941**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	108	108

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : BPS (2017, diolah)

Korelasi juga bernilai positif, berarti bahwa ada hubungan perubahan searah pada kedua variabel yaitu HPP beras dan harga gabah. Ketika terjadi perubahan berupa kenaikan pada HPP beras yang ditetapkan oleh pemerintah, maka harga gabah yang diterima petani juga akan mengalami kenaikan. Harga gabah yang diterima petani meningkat berarti bahwa pendapatan yang diterima petani juga mengalami kenaikan.

Korelasi Antara HPP Beras Dengan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan

Tabel 4.4. Korelasi Antara HPP Beras Dengan NTP-TP

		Correlations	
		NTPTP	HPPBERAS
NTPTP	Pearson Correlation	1	.166
	Sig. (2-tailed)		.087
	N	108	108
HPPBERAS	Pearson Correlation	.166	1
	Sig. (2-tailed)	.087	
	N	108	108

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian menunjukkan bahwa besar korelasi antara HPP beras dengan NTP-TP bernilai positif 0,166. Hal ini mengindikasikan ada kekeeratan hubungan yang searah antara HPP beras dengan NTP-TP. Namun keeratan hubungan ini tidak cukup kuat dan korelasi ini tidak signifikan meski di tingkat kesalahan ($\alpha = 5\%$).

Dengan demikian, H_0 dalam hipotesis penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel HPP beras dengan NTP-TP. Yang berarti juga bahwa kebijakan harga beras tidak berhubungan dengan kesejahteraan petani.

Korelasi Antar Variabel Berdasarkan Tahun Dasar

Series data yang digunakan pada penelitian ini adalah mulai tahun 2008 – 2016. Dalam kurun waktu tersebut, telah dilakukan perbaikan dasar oleh BPS. Perubahan tahun dasar ini bertujuan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian di perdesaan yang dirasa sudah mengalami perubahan dalam kurun waktu 5 tahun. Perubahan tahun dasar ini dilakukan setiap 5 tahun sekali.

Tahun dasar (2007 = 100) digunakan mulai tahun 2008 sampai dengan November 2013. Dan sejak Desember 2013 – sampai dengan sekarang tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan NTP adalah tahun dasar (2012 = 100).

Korelasi Antara HPP Beras Dengan Harga Gabah dengan Tahun Dasar (2007 = 100) dan Tahun Dasar (2012 = 100)

Hasil Analisis Korelasi Pearson menunjukkan bahwa besar korelasi antar dua variabel tersebut di tahun dasar (2007 = 100) adalah $r = 0,891$ dengan tingkat kepercayaan sebesar 99 persen. Keeratan hubungan kedua variabel ini sangat kuat dan memiliki hubungan yang searah.

Tabel 4.5. Korelasi Antara HPP Beras Dengan Harga Gabah Tahun Dasar (2007=100)

		HPPBERAS	GABAH
HPPBERAS	Pearson Correlation	1	.891**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	71	71
GABAH	Pearson Correlation	.891**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	71	71

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 4.6. Korelasi Antara HPP Beras Dengan Harga Gabah Tahun Dasar (2012=100)

		HPPBERAS	GABAH
HPPBERAS	Pearson Correlation	1	.690**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	37	37
GABAH	Pearson Correlation	.690**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	37	37

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sedangkan di tahun dasar (2012 = 100), hasil penghitungan analisis korelasinya menunjukkan nilai sebesar $r = 0,690$ dan signifikan di tingkat kepercayaan 99 persen. Korelasi bernilai positif dan menunjukkan keeratan hubungan yang kuat.

Korelasi Antara HPP Beras Dengan NTP-TP dengan Tahun Dasar (2007 = 100) dan Tahun Dasar (2012 = 100)

Hasil Analisis Korelasi antara HPP Beras dengan NTP-TP di tahun dasar (2007 = 100) adalah sebesar $r = -0,664$ dan signifikan di tingkat kepercayaan 99 persen. Korelasi ini bernilai negatif atau berlawanan arah, meski demikian kekuatan hubungan kedua variabelnya adalah kuat.

Demikian juga di tahun dasar (2012 = 100), hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan yang negatif atau berbalik arah yaitu sebesar $r = -0,074$. Meskipun antara HPP Beras dengan NTP-TP di tahun dasar (2012 = 100) terdapat korelasi, namun kekuatannya sangat lemah. Pun hasil analisis menunjukkan korelasi ini tidak signifikan.

Hasil analisis antara HPP Beras dengan NTP-TP di masing-masing tahun dasar tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.7. Korelasi Antara HPP Beras Dengan NTP-TP Tahun Dasar (2007=100)

Correlations

		NTPTP	HPPBERAS
NTPTP	Pearson Correlation	1	-.664**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	71	71
HPPBERAS	Pearson Correlation	-.664**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	71	71

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : BPS (2017, diolah)

Tabel 4.8. Korelasi Antara HPP Beras Dengan NTP-TP Tahun Dasar (2012=100)

Correlations

		NTPTP	HPPBERAS
NTPTP	Pearson Correlation	1	-.074
	Sig. (2-tailed)		.663
	N	37	37
HPPBERAS	Pearson Correlation	-.074	1
	Sig. (2-tailed)	.663	
	N	37	37

Sumber : BPS (2017, diolah)

Pembahasan

Korelasi Antara HPP Beras Dengan Harga Gabah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara variabel HPP beras dengan harga gabah dan menunjukkan korelasi yang memiliki keeratan hubungan yang kuat sekali antara dua variabel tersebut. Korelasi juga bernilai positif, berarti bahwa ada hubungan perubahan searah pada kedua variabel yaitu HPP beras dan harga gabah, sehingga ketika terjadi perubahan berupa kenaikan pada HPP beras yang ditetapkan oleh pemerintah, maka harga gabah yang diterima petani juga akan mengalami kenaikan. Harga gabah yang diterima petani meningkat berarti bahwa pendapatan yang diterima petani juga mengalami kenaikan. Korelasi kenaikan pendapatan ini juga mampu menaikkan Indeks Harga yang Diterima Petani.

Indeks Harga yang Diterima Petani adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu paket jenis barang hasil produksi pertanian pada tingkat harga produsen di petani dengan dasar suatu periode tertentu. Indeks ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani. Indeks ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

Apabila di lihat Indeks Harga yang Diterima Petani Subsektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, secara rata – rata dari Tahun 2008 ke Tahun 2016 memiliki indeks sebesar 111,14 dengan rata-rata perubahan sebesar 0,11 persen. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata tingkat harga gabah, sebagai salah satu produk

pertanian tanaman pangan, di Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2016 mengalami kenaikan secara rata-rata 1,11 kali lipat dibandingkan harga pada tahun dasar.

Hasil penelitian ini juga senada dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Suleiman pada tahun 2013, bahwa kebijakan harga berjalan searah dengan harga gabah. Dalam penelitian tersebut ketika diberlakukan perlakuan penghapusan kebijakan harga, maka harga gabah ditingkat petani mengalami penurunan, maka dengan demikian apabila pemerintah masih memberlakukan kebijakan harga, maka harga gabah ditingkat petani akan bertahan atau semakin meningkat ketika harga pemerintah dinaikkan.

Kebijakan harga beras perlu ditetapkan ada komoditas beras karena komoditas ini adalah memiliki andil pada perekonomian Indonesia. Kebijakan harga ini menjaga ketersediaan pangan bangsa Indonesia, sebagai bagian dari ketahanan pangan sehingga tetap pada produktivitasnya. Menurut Mulwanyi (2009), bahwa dengan adanya harga pembelian pemerintah, petani terpacu untuk meningkatkan produksi padinya. Ini terjadi karena petani merasa terlindungi dengan adanya kebijakan harga ini.

Korelasi Antara HPP beras Dengan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel HPP beras dengan NTP-TP namun hubungan ini tidak searah Hal ini berarti bahwa kebijakan harga beras justru menurunkan kesejahteraan petani.

Senada dengan hasil penelitian Mulwanyi (2009) yang mengambil lokasi penelitian di Indonesia, bahwa kebijakan harga beras hanya mampu meningkatkan produksi beras namun bukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani padi. Kebijakan harga beras akan berdampak pada kesejahteraan petani apabila dilakukan bersama-sama dengan kebijakan lain, misalnya meningkatkan area irigasi, mengembangkan infrastruktur pertanian dan diversifikasi pertanian atau mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras.

Dalam penelitian ini apabila dikaitkan dengan Nilai Tukar Petani, maka salah satu faktor yang jadi penyebab tidak adanya korelasi antara kebijakan harga beras dengan kesejahteraan petani adalah Indeks NTP-TP Sulawesi Tenggara yang rata-rata kurang dari 100. Indeks ini dipengaruhi oleh lebih besarnya pengeluaran produksi petani yang tercermin melalui Indeks Harga yang Dibayar Petani dari pada pendapatan yang diterima petani (Indeks Harga yang Diterima Petani).

Indeks Harga yang Dibayar Petani adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Data harga barang untuk keperluan produksi pertanian dan harga barang/jasa untuk keperluan konsumsi rumah tangga dicatat dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau penjual jasa di pasar terpilih. Data upah buruh tani dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani/buruh.

Selama kurun waktu 2008 – 2016, diketahui bahwa Indeks Harga yang dibayar Petani untuk subsektor tanaman pangan mengalami tren naik di setiap bulannya. Kenaikan tren ini menjelaskan bahwa petani tanaman pangan rata-rata mengalami kenaikan biaya produksi. Indeks Harga yang Dibayar Petani mengalami kenaikan tren setiap bulannya juga diikuti dengan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani, namun tidak jauh lebih besar. Sehingga kenaikan pendapatan petani tidak dapat menutupi

kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. dan mengakibatkan petani tanaman pangan di Sulawesi Tenggara mengalami kondisi yang tidak lebih baik daripada tahun dasar.

Penyusun Indeks Harga yang Dibayar petani adalah Indeks Konsumsi Rumah Tangga dan Indeks BPPBM. Kondisi yang terjadi adalah ketika terjadi peningkatan daya beli masyarakat, maka pendapatan petani akan ikut naik imbas dari kenaikan harga beras. Namun kenaikan harga ini juga berimbas pada kenaikan harga Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) serta kenaikan konsumsi rumah tangga. Sehingga, berapa pun kenaikan pendapatan, petani di Sulawesi Tenggara tidak mendapatkan keuntungan karena kenaikan beban pengeluaran.

Apabila dilihat dari Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan selama kurun waktu 6 tahun terakhir, IKRT Sulawesi Tenggara menunjukkan grafik yang sangat berfluktuatif yang bahkan secara rata-rata mengalami inflasi perdesaan. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Juli 2013 dimana pada saat itu pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni 2013. Kenaikan harga BBM sebesar Rp. 2.000,00 per liter untuk premium dan Rp. 1.000,00 per liter untuk solar, telah mendorong kenaikan harga-harga terutama pada kelompok harga yang ditetapkan (*administered price*) dan *volatile food*.

Kenaikan BBM ini di wilayah perdesaan Sulawesi Tenggara memberikan dampak pada inflasi perdesaan sub kelompok transportasi dan komunikasi sampai dengan 8,01 persen di kelompok Konsumsi Rumah Tangga. (BPS, 2013). Sedangkan di kelompok biaya produksi dan pembentukan barang modal, kenaikan harga BBM non subsidi berdampak inflasi pada sub kelompok transportasi hingga 8,50 persen.

Penyebab lain sehingga pendapatan petani tidak ikut naik padahal indeks Harga yang dibayar Petani mengalami peningkatan adalah perlunya pemerintah memberikan perhatian terhadap pertanian yang merupakan salah satu sektor riil yang mendukung perekonomian Indonesia. Misalnya adalah dengan upaya perbaikan dan peningkatan investasi modal/kapita di sektor pertanian, penciptaan suku bunga yang rendah dan menyediakan kredit khusus dari sisi pinjaman bank (Lena, 2007). Upaya lainnya adalah melalui subsidi input dan harga output untuk memberikan insentif bagi petani untuk terus berproduksi dan berdiversifikasi (Helmi, 2006).

Pada dasarnya kebijakan harga input, misalnya pupuk, sudah diberlakukan oleh pemerintah. Namun demikian, kebijakan tersebut ternyata belum berjalan efektif dalam mendukung produktivitas padi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Marisa, 2011 yang menganalisis efektifitas kebijakan subsidi pupuk dan pengaruhnya terhadap produksi padi menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan subsidi pupuk belum dapat dikategorikan efektif berdasarkan empat indikator utama, yaitu harga, tempat, waktu dan jumlah.

Beberapa gambaran tentang petani di Indonesia bahwa rata-rata petani di Indonesia, dan Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya, tidak hanya berusaha pada satu subsektor saja, dan atau memiliki usaha lain dalam menopang kehidupannya. Pada kenyataannya, petani padi tidak hanya menanam padi saja. Dia juga memiliki ternak ayam atau sapi atau bahkan anggota rumah tangganya ada yang berusaha di luar sektor pertanian.

Hal ini yang menyebabkan bahwa NTP tanaman pangan sulit untuk merangkak naik karena konsumsi rumah tangga petani tersebut yang menjadi salah satu penimbang

dalam penghitungan Indeks Harga yang Dibayar Petani tidak dipisahkan antara konsumsi dari hasil pertanian tanaman pangan dan konsumsi dari usaha lainnya. Sedangkan pendapatan petani yang dijadikan penghitungan Indeks Harga yang Diterima Petani hanya pendapatan yang diterima dari usaha pertanian tanaman pangannya saja.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian, pengolahan data, dan analisis hasil penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan searah dan signifikan pada kedua variabel yaitu kebijakan harga beras dengan harga gabah. Ketika terjadi perubahan berupa kenaikan pada HPP beras yang ditetapkan oleh pemerintah, maka harga gabah yang diterima petani juga akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena kebijakan harga mampu memberikan suatu perlindungan kepada petani untuk tetap berproduksi.
2. Melalui penghitungan berdasarkan tahun dasar, korelasi yang terbentuk antara kebijakan harga beras dengan kesejahteraan petani adalah saling berkebalikan. Ketika ada kenaikan HPP beras, maka indeks NTP-TP mengalami penurunan, yang berarti bahwa dengan adanya kebijakan harga beras maka kesejahteraan petani di Provinsi Sulawesi Tenggara justru menurun. Penyebabnya adalah laju kenaikan Indeks Harga yang Diterima petani tidak lebih besar daripada laju kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani.

Saran

1. Kebijakan Harga tidak cukup membantu untuk meningkatkan kesejahteraan petani, untuk itu perlu ada kebijakan lain terutama yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga serta Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM), misalnya adalah kebijakan harga pupuk, perbaikan infrastruktur pertanian, dan menyediakan kredit khusus dari sisi pinjaman bank, atau kebijakan lain.
2. Keterbatasan penelitian ini adalah variable penelitian yang sedikit, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa ditambahkan variable baru untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani di Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2013. *Berita Resmi Statistik, Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Tenggara Edisi Juli 2013*. Kendari: BPS.

_____, 2015. *Produksi Tanaman Padi dan Palawija di Sulawesi Tenggara 2015*. Kendari: BPS.

_____, 2016. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia*. Jakarta: BPS.

-
- _____,2016.*Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara 2011-2015*. Kendari: BPS.
- _____,2016.*Statistik Nilai Tukar Petani 2015*. Jakarta: BPS.
- Darman, 2016.*Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Skripsi. Universitas Halu Oleo, Kendari.
- Helmi, Akhmad, 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani*, Tesis. Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lena, Lira Mai, 2007. *Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Riil di Indonesia*, Tesis. Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Marisa, Suhaila, 2011. *Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Padi (Studi Kasus : Kabupaten Bogor)*, Skripsi. Departemen Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Mosher. AT, 1987. *Menciptakan Struktur Perdesaan Progresif*. Disunting oleh Rochim Wirjoniodjojo. Jakarta:Yasaguna
- Mulwanyi, Andrew, dkk. 2011. *Impact of Rice Purchasing Policy on Welfare of Both Producers and Consumers in Indonesia*. J.ISSAAS Vol. 17, No. 2:48-57(2011).
- Poerwadarminta, WJS, 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahim, Manat. 2010. *Dampak Kebijakan Harga Dan Impor Beras Terhadap Nilai Tukar Petani di Pantai Utara Jawa Barat*. Jurnal Trikonometrika Vol. 9 No,1 Hal. 29-36.
- Sadikin, Ikin, Subagyo, Kasdi. 2008. *Kinerja Beberapa Indikator Kesejahteraan Petani Padi di Perdesaan Kabupaten Kerawang 2008*. BPTP Jawa Barat. Bandung.
- Suleiman, Umar Haruna, 2013.*Effect of Paddy Price Support Withdrawal on Malaysia Rice Sector; Time Series Econometric Approach*. Asian Journal of Agriculture and Rural Development, 4(7) 2014: 401-413.
- Vibriane, Erra Septy.2017.*Korelasi Kebijakan Harga Beras Dengan Kesejahteraan Petani di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Halu Oleo, Kendari.